



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : OT. 02.01/4/4694/2016

Tgl. Pembuatan : 22 September 2016

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 23 September 2016

Disahkan oleh

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Barlian, SH, M.Kes

Nama SOP :

Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perpu Inisiatif Pemerintah

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
- 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Cover

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Ilmu Hukum secara keseluruhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan (Suncang)
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

- 1 SOP Disposisi Pimpinan
- 2 SOP Penyiapan Bahan Telaahan
- 3 SOP Penyelenggaraan rapat

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait
3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait
4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia terbaru
5. ATK dan peralatan kantor

Peringatan :

Apabila penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	Caraka	Kelengkapan	Waktu		Output
18	Menyetujui dan menetapkan surat pengantar RUU/R.PERPU kirim Presiden kepada Kementerian Sekretariat Negara dan mengarahkan kabag PP untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Konsep surat	5 menit	Surat permohonan persetujuan Presiden	
19	Menugaskan Kasubag PP untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	surat permohonan persetujuan Presiden	
20	Menginstruksikan perancang PUU, Arsiparis, dan Caraka untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	Surat permohonan persetujuan Presiden	
21	Melaksanakan proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							surat permohonan persetujuan Presiden	30 menit	surat permohonan persetujuan Presiden	
22	Melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi UU/PERPU yang telah disahkan							surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	Dokumentasi	